

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan saat ini menjadi isu strategis yang sangat gencar diperbincangkan yang pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademisi, kalangan politik dan tentunya masyarakat sendiri perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. Salah satunya adalah Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa tengah belum terlepas dari belenggu kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali pada Tahun 2013 berada di angka 13,27 % dan turun sebesar 0,91%. Pada Tahun 2014 menjadi 12,36%. Jika menggunakan standard target yang teruat pada dokumen Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) 2009-2014, Angka kemiskinan Nasional ditargetkan turun sebesar 8% target ideal sampai dengan 10% (target konservatif). Jumlah penduduk miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2014 adalah 118.581 atau sebesar 12,36%, berada

di bawah rata2 capaian nasional 13,58%. Akan tetapi capaian nasional sebesar 10,96%.¹

Untuk mewujudkan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan melakukan upaya kemitraan pihak swasta sebagai mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kapabilitas dan kemampuan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial suatu perusahaan sebagai pihak swasta terhadap lingkungan sekitar merupakan hal yang seharusnya dimiliki setiap perusahaan saat ini. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat mencerminkan kepedulian perusahaan serta dapat memberikan sebuah manfaat atas keberadaannya, bagi masyarakat, baik yang ada di sekitar perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. Perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan publiknya. Hubungan yang harmonis dapat terjalin apabila perusahaan peduli akan apa yang terjadi pada publiknya. Untuk dapat menunjang kegiatan tersebut, perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial yaitu kegiatan *corporate social responsibility* (CSR).

Kesadaran perusahaan tentang pentingnya mempraktikkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian yang mengutamakan *Stakeholders*. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial, dan lingkungan yang berlaku bagi

¹ RPJMD Kab. Boyolali 2016-2021

perseroan yang mengelola atau memiliki dampak terhadap sumber daya alam dan tidak dibatasi kontribusinya serta dimuat dalam laporan keuangan. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengatur tentang Corporate Social Responsibility (CSR), menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang saat ini dilakukan bukan lagi bersifat sukarela. Serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

1. CSR ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, dengan artian perseroan tersebut kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

2. CSR ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Tanggung jawab yang dimaksud menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan citra yang positif di mata masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Citra positif dapat timbul karena adanya apresiasi masyarakat. Citra dalam hal ini adalah kesan yang diciptakan oleh perusahaan secara sengaja sehingga menarik perhatian khalayak umum untuk mengamati serta memperhatikan dan mempunyai

pandangan tentang perusahaan tersebut. Sebuah pemahaman yang berasal dari informasi yang kurang lengkap akan menghasilkan citra yang kurang baik. Oleh karena itu, terciptanya suatu citra perusahaan yang baik di mata masyarakat akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan publiknya.

Program-program *Corporate Social Responsibility* yang telah dibuat ditujukan untuk lingkungan perusahaan serta masyarakat secara luas. Melalui program CSR, perusahaan dapat turut serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui berbagai aspek. Kegiatan CSR berhubungan dengan masalah sosial, seperti membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam, melakukan kegiatan donor darah, mengadakan sunatan massal, pemberian pengobatan gratis, dan lain-lain. Dalam hal ini, kegiatan CSR sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat dan erat juga terhadap pembentukan citra positif perusahaan.

PT. Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan yang mengaplikasikan kegiatan CSR yaitu pemberdayaan masyarakat dalam program Desa Wisata Rempah dan Buah, Kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Industri Jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk., bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan program “Desa Rempah” dan kemudian berkembang menjadi “Desa Wisata Buah” yang merupakan perpaduan di bidang pertanian dengan parawisata untuk mengoleksi tanaman obat. PT. Sido Muncul memiliki lembaga lain yang berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai timbal balik mereka dalam lingkup

tanggung jawab sosial perusahaan.² Program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, memperkuat destinasi kawasan wisata di wilayah Boyolali dan sekitarnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagian besar koleksi tanamannya merupakan bahan pembuatan jamu yang digunakan oleh industri dan tanaman lainnya masih dieksplorasi dari alam.

Program Desa Rempah telah dicanangkan sejak November 2014 dan baru berjalan optimal di tahun 2015 di Kabupaten Boyolali tepatnya di Desa Gladasari dan Desa Kaligentong, Ampel. Salah satu program Desa Rempah adalah memberikan masyarakat stimulan untuk meningkatkan ketertarikan pengelolaan budidaya rempah dengan bantuan bibit tanaman yang diberikan yaitu Jahe, dan Kayu Manis. Selain itu PT. Sido Muncul dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat juga memberikan pembinaan dan pendampingan budidaya tanaman rempah mulai dari penanaman sampai dengan pengelolaan.

Ditetapkannya Desa Gladasari dan Desa Kaligentong, Ampel, Kabupaten Boyolali sebagai lokasi program Desa Rempah salah satu faktor pertimbangan karena wilayah tersebut memiliki jalur lalu lintas strategis untuk wisatawan. Masih tersedianya lahan dan potensi desa yang sesuai dengan tujuan rencana program Desa

² Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Rempah menjadi pertimbangan PT. Sido Muncul mengembangkan program Desa Rempah di Kabupaten Boyolali

Pencanangan Desa Rempah dimulai dengan penandatanganan oleh Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat dan Bupati Boyolali Seno Samudro. Dilanjutkan pemberian bibit kayu manis dan bibit jahe secara simbolis kepada lurah Gladagsari Edi Suryanto. Pencanangan desa rempah itu merupakan kelanjutan dari pencanangan desa rempah yang pertama pada Oktober di Desa Gondoriyo, Semarang dengan budidaya kayu ules dan kunyit. Irwan mengatakan di Boyolali akan dibudidayakan tanaman kayu manis dan jahe.³

Menurut Irwan⁴, selama ini kebutuhan bahan baku jamu di pabriknya mencapai rata-rata 60 ton perhari. Dengan adanya desa rempah ini diharapkan kebutuhan itu dapat tercukupi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu, dengan menggalakkan budidaya tanaman jamu di sekitar pabrik, dapat meminimalkan proses distribusi dan biaya pengiriman, karena selama ini bahan baku jamu banyak didatangkan dari luar Jawa. Di kedua desa ini juga akan dilakukan penyuluhan dan pembinaan pembuatan pupuk organik, serta bantuan alat pemotong singkong untuk pembuatan keripik singkong. Hal ini mengingat kedua desa itu merupakan penghasil singkong.⁵

³ <http://semarang.bisnis.com/read/20141128/2/75119/sido-muncul-canangkan-desa-rempah-di-boyolali>

⁴ ibid

⁵ <http://www.beritasatu.com/nasional/228836-desa-gladagsari-dan-kaligentong-dicanangkan-jadi-desa-rempah-dan-wisata.html>

Penulis ingin meneliti citra yang di hasilkan dari program kegiatan CSR. Pada penelitian ini berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT. Sido Muncul yaitu program CSR yang telah dibuat ditujukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, memperkuat destinasi kawasan wisata dan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam kenyataannya, terdapat keterkaitan antara perusahaan dengan masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat, kemitraan kerja yang erat yang didasari rasa ketergantungan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam *corporate social responsibility* program Desa Rempah di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Rempah di Kabupaten Boyolali?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam *corporate social responsibility* program Desa Rempah di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam Program Desa Rempah di Kabupaten Boyolali.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai adanya metode pemberdayaan masyarakat antara lembaga pemerintahan daerah dengan lembaga swasta dalam membangun kualitas pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui program bantuan *Corporate Social Responsibility*.

2. Bagi Kabupaten Boyolali

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil-hasil temuan dalam analisis program pemberdayaan masyarakat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Boyolali dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki wewenang mengurus bidang pertanian serta program pemberdayaan di Kabupaten Boyolali dengan PT. Sido Muncul sebagai pemberi bantuan program

Pemberdayaan Desa Wisata Rempah di daerah Desa Gladasari dan Desa Kaligentong, Ampel, Boyolali, sehingga dapat dievaluasi agar kedepannya dapat terus dikembangkan atau diperbaiki jika terdapat beberapa kendala selama proses berjalan.

3. Bagi Universitas

Hasil temuan yang di dapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan referensi untuk penelitian lanjutan secara mendalam terkait masalah maupun informasi yang diperoleh dari analisis kegiatan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Boyolali dengan PT. Sido Muncul Tbk.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru bagi masyarakat Kabupaten Boyolali mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan visinya untuk “Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan Di Desa Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna Untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat Yang Berkelanjutan”,⁶ melalui kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata Rempah di Kabupaten Boyolali.

1.5 Kerangka Pemikiran Teori

Kerangka teoritis mengungkapkan pilihan paradigma yang akan digunakan dengan menjelaskan karakteristik paradigma berdasarkan asumsi. Pada bagian ini

⁶ Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021

juga akan dipaparkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitis.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan beberapa telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan program *corporate social responsibility* sebagai salah tanggung jawab sosial kepada daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Fuad Setyo Budi, dengan judul pemberdayaan masyarakat dalam implementasi *corporate social responsibility* PT. Sido Muncul dengan studi Kajian program desa Rempah di Kabupaten Semarang.⁷

Proses penelitian ini melihat pelaksanaan pemberdayaan program desa rempah di Kabupaten Semarang serta untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan pemberdayaan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan program. Minat masyarakat terhadap program desa rempah rendah dikarenakan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan yang kurang mendukung. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah sosialisasi dan pelatihan. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ditunjukkan dengan adanya inisiatif dalam pembuatan organisasi pengurus program desa rempah, pembuatan pupuk kompos, partisipasi dalam bentuk bantuan uang tunai, dan

⁷ Setyo Fuad Budi (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Sido Muncul (Studi Kajian Program Desa Rempah Di Kabupaten Semarang). Jurnal Universitas Diponegoro.

pertisipasi dalam evaluasi program. Selain itu hasil penelitian juga menemukan bahwa pada tahun 2016 hanya dua dari enam desa sasaran yang masih melaksanakan kegiatan pemberdayaan yaitu Desa Gondoriyo dan Desa Bergas Kidul. Program desa rempah merupakan hasil CSR PT. Sido Muncul yang bersifat defensif.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erna Kurnia dengan judul Pola Kemitraan Yayasan Obor Tani (LSM) Dan Masyarakat Dalam Memberdayakan Petani Desa Wonokerto Kabupaten Semarang.⁸ penelitian ini mendiskripsikan bagaimana pola kerjasama yang terjalin antara Yayasan Obor Tani dan masyarakat Desa Wonokerto yang tergabung dalam Sentra Pemberdayaan Tani. Selain itu, penelitian ini untuk menjelaskan bagaimanakah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Obor Tani dan masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Yayasan Obor Tani dan masyarakat merupakan kemitraan yang bersifat mutualisme dimana pihak-pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari kemitraan. Bagi masyarakat, kemitraan yang dilakukan selama 3,5 tahun memberikan dampak peningkatan penghasilan melalui budi daya buah naga, pembangunan waduk mini dan pembangunan wisma pelatihan. Sedangkan bagi Yayasan, pemberdayaan di Desa Wonokerto dapat meningkatkan nilai tambah yayasan atas pertanggungjawabannya kepada pihak donatur yaitu PT Pertamina sehingga ke depan Yayasan Obor Tani bisa

⁸ Kurnia Erna (2017) Pola Kemitraan Yayasan Obor Tani (Lsm) Dan Masyarakat Dalam Memberdayakan Petani Desa Wonokerto Kabupaten Semarang. Jurnal Universitas Diponegoro

menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar melalui program CSR. Keberhasilan dalam memproduksi buah naga yang berkualitas juga membantu Hortimart Agro Center dan toko buah lainnya mendapatkan persediaan buah berkualitas unggul tanpa harus melalui impor. Bagi pemerintah, program pemberdayaan memiliki manfaat yaitu membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan MDG's.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

| No | Nama/Judul | Isi | Gap/Overlape |
|-----|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Fuad Setyo Budi Jurnal Universitas Diponegoro Judul : Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Sido Muncul (Studi Kajian Program Desa Rempah Di Kabupaten Semarang) | <ul style="list-style-type: none"> •Pemberdayaan dalam Program Desa Rempah membidik masyarakat sekitar pabrik sebagai sasarannya guna meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui program desa rempah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program desa rempah merupakan bentuk konkrit tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat di sekitar perusahaan yang biasanya | Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian yaitu tentang Program Desa Rempah merupakan program pemberdayaan masyarakat dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang sudah ada, baik lahan kosong, lahan yang tidak produktif, ataupun |

| No | Nama/Judul | Isi | Gap/Overlape |
|-----|------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | mendapat dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan, dengan adanya pemberdayaan melalui program desa rempah tersebut, maka masyarakat akan mendapatkan <i>feedback</i> positif dari perusahaan | <p>lahan produktif yang memungkinkan tumpang sari dengan ditanami tanaman obat</p> <p>Objek penelitian adalah sama-sama penduduk pedesaan yang terfokus pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada pelaksanaan Program pemberdayaan Masyarakat Desa Rempah belum terdapat pola terkordinasi <p>Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian, Jika penelitian pertama dilakukan di Kabupaten Semarang |

| No | Nama/Judul | Isi | Gap/Overlape |
|-----|------------|-----|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | <p>. di Desa Gondoriyo, Desa Bergas Kidul, Diwak, Karangjati dan Ngempon yang masuk dalam Kecamatan Bergas, serta Desa Klepu Kecamatan Pringapus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Pertama Pertimbangan kabupaten semarang sebagai daerah program desa rempah di karenakan tempat dan lokasi produksi Pabrik Sido Muncul di wilayah Kabupaten Semarang. • Maka penelitian kedua adalah ditetapkannya desa rempah di kabupaten Boyolali sebagai lokasi Desa Rempah dikarnakan potensi baik Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dirasa sesuai dengan tujuan program Desa Rempah. Wilayah desa sasaran Program Desa rempah di Kabupaten Boyolali |

| No | Nama/Judul | Isi | Gap/Overlape |
|-----|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | <p>memiliki jalur lalu lintas strategis untuk dikembangkan menjadi tempat wisatawan,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian pertama dalam sosial budaya masyarakat Kabupaten dari mata pencaharian Masyarakat lebih mayoritas bekerja di sektor Industri • Penelitian ke dua untuk sosial budaya Kabupaten Boyolali masyarakat tergolong Masyarakat pedesaan dan mayoritas mata pencaharian masyarakat tempat sasaran program desa rempah adalah mengelolah lahan (petani atau peternak) |
| 2 | <p>Erna Kurnia Jurnal Universitas Diponegoro Judul Skripsi : Pola Kemitraan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan bagaimana pola kerjasama yang terjalin antara Yayasan Obor Tani dan masyarakat Desa Wonokerto yang tergabung dalam Sentra Pemberdayaan Tani. Selain | <p>Persamaan :</p> <p>Fokus penelitian dilakukan terhadap masyarakat petani di Desa melalui sebuah program</p> |

| No | Nama/Judul | Isi | Gap/Overlape |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | <p>Yayasan Obor Tani (Lsm) Dan Masyarakat Dalam Memberdayakan Petani Desa Wonokerto Kabupaten Semarang</p> | <p>itu, penelitian ini untuk menjelaskan bagaimanakah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Obor Tani dan masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan yang terjalin antara Yayasan Obor Tani dan masyarakat merupakan kemitraan yang bersifat mutualisme dimana pihak-pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari kemitraan. Bagi masyarakat, kemitraan yang dilakukan selama 3,5 tahun memberikan dampak peningkatan penghasilan melalui budi daya buah naga, pembangunan waduk mini dan pembangunan wisma pelatihan. Sedangkan bagi Yayasan, pemberdayaan di Desa Wonokerto dapat meningkatkan nilai tambah yayasan atas pertanggungjawabannya kepada pihak donatur yaitu PT Pertamina sehingga ke depan Yayasan Obor Tani bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar melalui program CSR. Keberhasilan | <p>pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa</p> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada penelitian pertama, fokus penelitian program kemitraan yang terjalin antara Yayasan Obor Tani dan masyarakat Desa Wonokerto yang tergabung dalam Sentra Pemberdayaan Tani ➤ Pada penelitian kedua, belum adanya organisasi yang terkordinasi dalam program pemberdayaan Masyarakat Desa Rempah di Kabupaten Boyolali, sehingga menjadi salah satu hambatan pelaksanaan program pemberdayaan Desa Rempah di Kabupaten Boyolali |

| No | Nama/Judul | Isi | Gap/Overlape |
|-----|------------|---|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | <p>dalam memproduksi buah naga yang berkualitas juga membantu Hortimart Agro Center dan toko buah lainnya mendapatkan persediaan buah berkualitas unggul tanpa harus melalui impor. Bagi pemerintah, program pemberdayaan memiliki manfaat yaitu membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan MDG's. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar model kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan Obor Tani dapat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan desa lain di Indonesia.</p> | |

Sumber : Jurnal Ilmiah yang diolah

1.5.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan landasan yang digunakan oleh peneliti untuk mengaitkan temuan dan data yang diperoleh. Teori menjadi basis awal untuk menangkap realita yang akan dikaji dalam penelitian.

1.5.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari kata dasar tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang memiliki daya.

Proses dari pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas atau kegiatan dan langkah – langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang berupaya untuk mengubah masyarakat yang pada awalnya memiliki kemampuan yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang lebih berdaya. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, yang meliputi pengetahuan, sikap, dan perilaku menuju pada penguasaan dan ketrampilan yang baik.

Prijono dan Pranarka⁹ menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority* yang meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*, yang mempunyai artian memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

⁹ Prijono, Onny S. Dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta

Sumodiningrat¹⁰ berpendapat bahwa istilah pemberdayaan, di barat diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah tersebut dirasa tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi daya bukan memberi kekuasaan. *Empowerment* di negeri barat lebih merujuk pada “pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan”. Ia berpendapat bahwa istilah yang tepat untuk pemberdayaan adalah “*energize*”. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Winarni¹¹ menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Pada dasarnya masyarakat memiliki kemampuan atau daya di dalam diri mereka. Akan tetapi, daya yang terdapat pada masyarakat tersebut belum disadari dan belum dimanfaatkan secara optimal. Pemberdayaan akan menggali daya yang terdapat dalam masyarakat untuk lebih dioptimalkan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya menuju kemandirian.

¹⁰ Sumodiningrat, Gunawan. 2000. “Visi dan Misi Pembangunan dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat” dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Menyongsong Indonesia Baru. 20 Mei 2000. Idea. Yogyakarta.

¹¹ Winarni, Tri. 1998. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Aditya Media. Yogyakarta. Hlm: 75-76

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksud meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah - masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Kondisi kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai - nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Untuk menjadi masyarakat yang mandiri diperlukan adanya dukungan kemampuan berupa sumberdaya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik-material.

1.5.2.1.1 Prinsip – Prinsip Pemberdayaan

Setiap penyuluh atau fasilitator pemberdayaan, dalam menjalankan tugas kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip – prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip – prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh tidak mungkin dapat melaksanakannya dengan baik.

Dahaman dan Bhatnagar (1980)¹² mengungkapkan prinsip – prinsip pemberdayaan yang mencakup :

1. Minat dan kebutuhan

Pemberdayaan akan efektif apabila selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut mengarah pada apa yang benar – benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.

2. Organisasi masyarakat bawah

Pemberdayaan akan efektif apabila mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/ kekerabatan.

3. Keragaman budaya

Pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang

¹² Mardikanto totok dan Poerwoko Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung. Hal. 106

beragam. Di sisi lain, perencanaan pemberdayaan yang seragam untuk setiap wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.

4. Perubahan budaya

Pemberdayaan akan mengakibatkan terjadinya perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati – hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan – kejutan budaya. Karena itu setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai – nilai budaya lokal.

5. Kerjasama dan partisipasi

Pemberdayaan hanya akan efektif apabila mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program – program pemberdayaan yang telah dirancang.

6. Demokrasi dalam penerapan ilmu

Pemberdayan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan, penggunaan metode pemberdayaan, dan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sarannya.

7. Belajar sambil bekerja

Kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.

Pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep – konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.

8. Penggunaan metode yang sesuai

Pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya sarannya, dengan kata lain tidak satupun metode yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif.

9. Kepemimpinan

Penyuluh/ fasilitator tidak melakukan kegiatan – kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/ kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin – pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaannya.

10. Spesialis yang terlatih

Penyuluh merupakan pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.

11. Segenap keluarga

Penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.

12. Kepuasan

Pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program – program pemberdayaan selanjutnya.

1.5.2.1.2 Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan tidak secara terus menerus dan selamanya, melainkan sampai masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk menjadi mandiri. Tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan – keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantrakan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan tersebut pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan

dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Tahap kedua merupakan proses transformasi pengetahuan dan kecakapan – keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat dan berjalan efektif apabila tahap pertama telah terkondisikan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang memiliki tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan serta keterampilan yang diperlukan, agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Terjadinya kemandirian akan ditandai dengan kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga tersebut maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Serangkaian tahapan yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan, dapat damati pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Tahapan Pemberdayaan *Knowledge, Attitude, Practice* dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif

| Tahapan Afektif | Tahapan Kognitif | Tahapan Psikomotorik | Tahapan Konatif |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Belum merasa sadar & peduli | Belum memiliki wawasan pengetahuan | Belum memiliki keterampilan dasar | Tidak berperilaku membangun |
| Tumbuh rasa kesadaran & kepedulian | Mengetahui pengetahuan dasar | Menguasai ketrampilan dasar | Bersedia terlibat dalam pembangunan |
| Memupuk semangat kesadaran & kepedulian | Mengembangkan pengetahuan dasar | Mengembangkan keterampilan dasar | Berinisiatif untuk mengambil peran |
| Merasa membutuhkan kemandirian | Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi | Memperkaya variasi keterampilan | Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan |

Sumber: Ambar Teguh Sulistiyani, 2004 : 84

Tahapan pemberdayaan, menurut Tim Delivery, kegiatan pemberdayaan masyarakat diawali dengan proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut¹³ :

1. Seleksi Lokasi / Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak – pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti diharapkan.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan mencakup berbagai indikator kegiatan yang dilakukan bersama - sama dengan masyarakat. Hal tersebut mencakup:

- a. Kajian keadaan pedesaan partisipatif

¹³ Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta. Hlm. 122

Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang – peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.

b. Pengembangan kelompok.

Aktifitas yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian.

c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.

Menetapkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya bersama dengan dukungan fasilitas dari pendamping. Selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan apabila dilakukan.

d. Monitoring dan evaluasi partisipatif

Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif. Kegiatan ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. Kegiatan ini adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan apabila diperlukan.

e. Pemandirian masyarakat

Prinsip dari pemberdayaan masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar – benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Kegiatan pemberdayaan akan semakin berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

1.5.2.1.3 Pendekatan Pemberdayaan

Terdapat dua pendekatan dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. Pertama adalah pendekatan zero-sum, dimana pendekatan ini merupakan cerminan pemberdayaan model barat. Pendekatan ini lebih sesuai untuk menganalisis pemberdayaan dalam pengertian pengalihan kekuasaan, dalam konteks pengalihan kekuasaan dari pihak yang sebelumnya memegang kekuasaan, kepada pihak yang tidak memiliki kekuasaan, maka akan berkurangnya kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pertama, karena sebagian telah beralih kepada pihak kedua. Pendekatan zero-sum menjadi kurang relevan jika dipergunakan untuk menganalisis sebuah proses pemberdayaan, dalam konteks pemberian kemampuan dari pihak yang memiliki kemampuan kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan.

Implikasi dari pendekatan zero-sum tersebut adalah orang atau lembaga menjadi enggan untuk melakukan pemberdayaan terhadap kelompok atau lembaga lain. Jika proses pemberdayaan yang dimaksud merupakan pengalihan kekuasaan, maka akan berkurangnya kekuasaan mereka. Jika demikian maka penguasa tidak akan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan *positive-sum*. Pendekatan *positive-sum* merupakan pertentangan dari pendekatan *zero-sum*. *Positive-sum* melihat bahwa proses pemberdayaan dari pihak yang berkuasa kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya pihak pertama. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah.

Sudut pandang dari pendekatan *positive-sum* dapat memfasilitasi terjadinya proses pemberdayaan yang hakiki, dengan adanya iktikad baik untuk mengubah keadaan, yang tidak berdaya menjadi berdaya. Kekuatan dan keberdayaan yang tumbuh dalam masyarakat akan memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah dan negara. Keberdayaan masyarakat akan menjadi penyeimbang bagi pemerintah dan sektor swasta yang akan berbentuk pemberdayaan masyarakat yang lebih bermakna.

1.5.2.1.4 Keberhasilan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan merupakan proses interaksi semua pihak antara pengusaha dan masyarakat untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Keberhasilan suatu perencanaan program tidak hanya bergantung pada kualifikasi pemberdayaan masyarakat saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan faktor – faktor lain. Pesson (Sanders, 1966)¹⁴ mengemukakan adanya lima faktor yang penting untuk selalu diperhatikan, yaitu:

¹⁴ Mardikanto totok dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung. Hal. 248

1. Identifikasi sistem sosial yang bersangkutan

Adanya identifikasi sistem sosial sebelum perencanaan program sangat diperlukan, sebab penerima manfaat pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Melalui identifikasi sistem sosial, akan dapat diketahui beberapa hal yang menyangkut: nilai-nilai sosial budaya masyarakat, struktur kekuasaan. Kebiasaan perilaku, dan lain sebagainya yang sangat menentukan keberhasilan perencanaan program.

2. Identifikasi mengenai “*key individual*” dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat

Setiap sistem sosial, biasanya memiliki struktur kekuasaan tertentu dengan “*key individual*” yang khusus pula. Individu kunci tersebut, pada umumnya dapat dipegang oleh pemimpin formal, tetapi dalam banyak kasus dapat juga dipegang oleh tokoh-tokoh informal seperti: pemuka agama, tokoh politik, pedagang, petani, dan sebagainya. Penelusuran terhadap individu-individu kunci sangat diperlukan dalam perencanaan program, sebab mereka dapat mengembangkan opini publik yang sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

3. Penerimaan tujuan program oleh *key-individual*

Karena pentingnya peran *key individual* dalam kehidupan masyarakat, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh program yang dirancang itu benar-benar telah diterima oleh *key individual*. Sebelum

rumusan program memperoleh legitimasi dari mereka, keberhasilan program masih sangat diragukan.

4. Peran serta secara aktif *key individual* dan individu dalam masyarakat

Keberhasilan pembangunan pada dasarnya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, baik dalam pemberian input, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun pemanfaatan hasil – hasil pembangunan. Karena itu, peran serta aktif setiap individu dalam masyarakat penerima manfaat, terutama *key individual* akan sangat menentukan keberhasilan perencanaan program.

5. Dorongan aktif dari setiap individu dalam masyarakat

Adanya peran serta aktif setiap warga masyarakat, sebenarnya belum cukup jika tidak disertai dengan dorongan – dorongan yang mereka berikan demi keberhasilan program. Sebab peran serta masyarakat seringkali hanya terbatas kepada pemenuhan harapan yang dimintakan kepadanya, tanpa dibarengi oleh sikap atau kehendak yang dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan tentang manfaat program yang dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam setiap perencanaan program perlu untuk selalu ditumbuhkan semangat membangun di kalangan setiap warga masyarakat, sehingga mereka tidak hanya berpartisipasi karena diminta, tetapi secara aktif mendorong keberhasilan program – program yang direncanakan.

Peran yang diaplikasikan oleh pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi-tawar) masyarakat semakin mandiri. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan

kapasitas. Penguatan Kapasitas disini adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem dan jejaring antar individu dan kelompok/organisasi sosial. Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan.

Terkait dengan upaya penguatan kapasitas Masyarakat dilakukan, keberhasilan proses dalam pemberdayaan masyarakat bukan merupakan keberhasilan pengelola atau fasilitator, melainkan harus dilakukan oleh peran serta Masyarakat sebagai keberhasilan usaha mereka sendiri sebagaimana yang dikemukakan Lao Tsu.¹⁵

1.5.2.2 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU Nomor 40 tentang PT). *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada

¹⁵ Mardikanto totok dan Poerwoko Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung. Hal. 106

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan (Untung 2007:1). 16 Definisi CSR menurut Petkoski dan Twose (2003) yaitu sebagai komitmen bisnis untuk berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi, bekerja sama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas, untuk meningkatkan mutu hidup mereka dengan berbagai cara yang menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan.

World bank mendefinisikan CSR sebagai “ *is commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of live, in ways that are both good for business and good for development*”. Schermerhon (1993) memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal. CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana 2005). Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Pearce II dan Robinson (2008) adalah gagasan bahwa suatu perusahaan memiliki tugas untuk melayani masyarakat sekaligus kepentingan keuangan pemegang sahamnya. Setiap perusahaan, tanpa memperhatikan ukurannya, harus menentukan bagaimana mereka akan memenuhi tanggung jawab sosial yang diminta.

Setiap perusahaan juga menggunakan pendekatan yang 17 berbeda-beda untuk mencerminkan perbedaan dalam posisi kompetitif, industri, negara, tekanan lingkungan dan ekologi, dan sejumlah faktor lainnya. Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Anggraini 2006). CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (Majalah Bisnis & CSR 2007). Sementara versi Uni Eropa dalam Amaeshi dan Adi (2006) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. UUPT juga mengatur ketentuan mengenai CSR.

Pengertian CSR diatur di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Mengenai pelaksanaan CSR ini harus dimuat di dalam laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT). Dalam hal ini, UUPT mewajibkan bagi setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2) UUPT). Selanjutnya, dinyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat (3) UUPT). 19 Tanggung jawab sosial merupakan pasal yang tidak dapat dipisahkan dari good corporate governance karena pelaksanaan CSR merupakan pasal dari salah satu prinsip yang berpengaruh dalam good corporate governance. Pada dasarnya ada lima prinsip dalam good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran.

Prinsip yang berkaitan erat dengan CSR adalah responsibilitas yang merupakan aspek pertanggung jawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk

melaksanakan prinsip CSR karena dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat sekitar, ditekankan juga pada signifikansi filantropik yang diberikan dunia usaha kepada kepentingan pihak-pihak eksternal dimana perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholder perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Diluar itu, lewat prinsip responsibility diharapkan membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial saja) tetapi harus berpijak pada triple bottom lines, di mana bottom lines selain financial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).

Secara garis besar CSR dilihat sebagai program berdampak positif yang berlandaskan etika dan memajukan perekonomian bangsa dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarga perusahaan itu. Selain itu CSR secara tidak langsung merupakan pertanggung jawaban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang mereka hasilkan. Selama perusahaan itu memproduksi baik jasa maupun barang, pastilah mereka ikut memberikan dampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan,

menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Dari beberapa definisi yang ada diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep mengintegrasikan kegiatan bisnis perusahaan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup *stakeholders* perusahaan dan juga lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.

1.5.2.2.1 Aksi Nyata Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

“Konsepsi tanpa akasi adalah mimpi, aksi tanpa konsepsi hanyalah kegiatan rutin sehari-hari”. Program aksi CSR menurut Edi Suharto (2010:135) meliputi:

1) Tanggung jawab sosial perusahaan Bidang Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka tidak mengherankan apabila pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan setiap perusahaan. Misalnya memberikan beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaan peralatan, pengadaan peralatan yang menunjang pendidikan dan lain sebagainya.

2) Tanggung jawab sosial perusahaan Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target Milenium Development Goals (MDGs). Dengan demikian, program-program tanggung

jawab sosial perusahaan sudah sebaiknya tidak meninggalkan program di bidang kesehatan ini. Program-program tanggung jawab sosial perusahaan bisa dilakukan dengan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang semestinya dilakukan di daerah setempat.

3) Tanggung jawab sosial perusahaan Bidang Lingkungan

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan sering kali dianggap berada dalam ranah publik. Di masa lalu pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, baik melalui regulasi, sanksi dan tidak jarang melalui penawaran insentif. Sementara itu, sektor swasta hanya dilihat sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah lingkungan.

4) Tanggung jawab sosial perusahaan Bidang Modal Sosial

Bidang sosial dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan sering kali dilihat sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam rangka mencapai keharmonisan sosial antara perusahaan dan lingkungannya (masyarakat). Misalnya pembangunan infrastuktur, pembinaan karang taruna, sunatan massal, bantuan sosial pesta adat, bantuan bencana alam dan lain sebagainya.

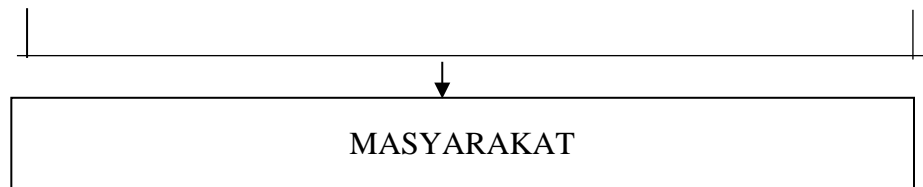
5) Tanggung jawab sosial perusahaan Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka program peningkatan pendapatan masyarakat sering kali menjadi

program andalan setiap perusahaan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Peningkatan pendapatan ekonomi ini bisa diterapkan dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan hingga program pemberdayaan petani.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Aksi Nyata Program CSR





Sumber : Jurnal Manajemen Vol.09 No.4 Juli 2012, Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina Gas Area JBB Distrik Cilamaya Bagi Masyarakat, Dr. Dedi Mulyadi, H. Sonny Hersona, GW, Drs., MM, Linda Devis May, SE, Hal 907.

1.6 Oprasionalisasi Konsep

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan Masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi memiliki daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dirancang dan direncanakan dengan baik belum tentu dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Minat dan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mencari gambaran mengenai beberapa hal berikut:

- a. Minat dan kebutuhan masyarakat sasaran pemberdayaan
- b. Kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan ketersediaan sumberdaya yang ada
- c. Prioritas minat dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi terlebih dahulu

2. Organisasi masyarakat bawah

Indikator tersebut diarahkan untuk menggambarkan beberapa hal berikut:

- a. Keterlibatan setiap anggota keluarga dalam pemberdayaan
- b. Cakupan atau sasaran dari pemberdayaan masyarakat

3. Keragaman dan perubahan budaya

Indikator ini akan digunakan untuk menggambarkan beberapa hal berikut:

- a. Budaya lokal/ kearifan lokal yang terdapat di masing – masing desa sasaran pemberdayaan
- b. Kondisi sosial dan ekonomi di masing – masing desa sebelum adanya program pemberdayaan
- c. Kondisi sosial dan ekonomi di masing – masing desa setelah adanya program pemberdayaan

4. Kerjasama dan partisipasi

Indikator ini akan digunakan untuk menggambarkan beberapa hal berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan

- b. Dukungan dari segenap elemen masyarakat untuk keberhasilan program pemberdayaan
5. Adanya demokrasi dalam penerapan ilmu
- a. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan penggunaan metode pemberdayaan
 - b. Aktivitas masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program pemberdayaan
 - c. Keleluasaan penyuluh pemberdayaan dalam menerima aspirasi dari masyarakat

6. Belajar sambil bekerja

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pengetahuan baru yang diperoleh masyarakat dengan adanya program pemberdayaan

7. Penggunaan metode yang sesuai

Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui metode pemberdayaan yang digunakan di desa sasaran program pemberdayaan dengan mengacu pada :

- a. Kondisi lingkungan fisik desa sasaran
- b. Kemampuan ekonomi masyarakat
- c. Nilai sosial budaya masyarakat

8. Kepemimpinan

Indikator ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai beberapa hal berikut:

- a. Peran penyuluh dalam menumbuhkan pemimpin lokal
- b. Ketersediaan pemimpin lokal untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pemberdayaan
- c. Peran pemimpin lokal dalam program pemberdayaan

9. Spesialis yang terlatih

Indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan beberapa hal berikut:

- a. Jumlah penyuluh/ fasilitator
- b. Kualitas penyuluh/ fasilitator
- c. Motivasi penyuluh/ fasilitator

10. Segenap keluarga

Indikator tersebut akan digunakan untuk menggambarkan beberapa hal berikut:

- a. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan terkait program pemberdayaan
- b. Pengelolaan keuangan keluarga
- c. Kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani

11. Kepuasan

Indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan beberapa hal berikut:

- a. Manfaat pemberdayaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi
- b. Harapan masyarakat terkait program pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumberdaya setempat sebaik mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam program desa rempah yang diinisiasi oleh PT. Industri jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dalam kerangka *Corporate Social Responsibility*.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan pemaparan secara komprehensif dari hasil wawancara dan pengamatan kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis (Nugroho, 2013: 86). Tentunya hasil analisis dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada lokasi penelitian.

Metode kualitatif digunakan, karena bertujuan dan berusaha untuk mendapatkan pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna,

kenyataan dan fakta yang relevan terkait program desa rempah di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Serta mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi proses dari program pemberdayaan di Kabupaten Boyolali. Tujuan dari deskriptif disini adalah membuat, menggambarkan, meringkas dan menganalisis berbagai kondisi dan situasi yang timbul di masyarakat Kabupaten Boyolali dengan adanya program desa rempah yang menjadi objek penelitian secara mendalam

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian yang berfokus pada adanya program pemberdayaan masyarakat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan swasta yang dalam hal ini merupakan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang di kembangkan Oleh PT. Sido Muncul dalam Program pemberdayaan masyarakat Desa Rempah daerah Desa Gladasari dan Desa Kaligentong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali Maka yang menjadi situs penelitian ini adalah “Desa Rempah”. Bertempat di Desa Gladasari dan Desa Kaligentong, Ampel, Boyolali. Diambilnya seluruh desa yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat sebagai situs penelitian, diharapkan dapat menggambarkan realita pemberdayaan yang terjadi di masyarakat.

1.7.3 Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang – orang yang terkait dalam program Desa Rempah di Kabupaten Semarang. Subyek penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan dengan sengaja), yang berarti dalam penentuan narasumber ini tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan untuk

mewakili informasi. Jika dalam penelitian kuantitatif sampel harus mewakili populasi, misalnya ada prosentase atau rumus yang jelas tentang pengambilan sampel, tetapi dalam kualitatif tidak berdasarkan pada pertimbangan itu. Artinya ketika peneliti kualitatif hendak meneliti suatu masyarakat pada suatu wilayah, maka informan yang dapat diambil boleh terbatas yang terpenting adalah informasinya dianggap sudah mewakili informasi secara keseluruhan. Informan yang akan dijadikan subjek penelitian adalah :

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali atau Kecamatan Ampel yang berperan aktif dalam program Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Desa di Desa Gladasari dan Desa Kaligentong, Ampel, Boyolali.
3. Ketua Kelompok Tani di masing – masing desa yang dijadikan situs penelitian.
4. Perwakilan masyarakat di Desa Galadasari dan Desa Kaligentong yang dijadikan situs penelitian
5. Pihak terkait dari PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Peneliti juga akan mengambil teknik pengambilan informan dengan *accidental sampling* (pengambilan dengan ketidak sengaja saat bertemu di lokasi penelitian) pada beberapa responden dalam hal ini masyarakat, Pemerintah Desa, atau Pemerintah Kabupaten dan pihak dari PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk., yang paham tentang pemberdayaan masyarakat dalam Program Desa Rempah

1.7.4 Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain¹⁶. Maka data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sekaligus sumber data tertulis berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki kedua belah pihak.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data sebagai pemenuhan kebutuhan penelitian ini terbagi menjadi dua sumber (Sugiyono, 2009: 225). Yaitu :

1. Sumber data primer.

Digunakan sebagai sumber utama yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Didapatkan melalui wawancara dari para informan, yang telah ditetapkan sebagai responden kedalam subjek penelitian, dan observasi.

2. Sumber data sekunder.

Digunakan sebagai data pendukung penelitian yang didapat melalui dokumen dan arsip resmi yang dimiliki kedua belah pihak

¹⁶ Dr. Lexy J. Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Bandung : Remaja Rosdakarya. hal 112

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memahami, menangkap dan mengumpulkan informasi dari fenomena yang menjadi perhatian penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Esterberg, teknik ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Terdapat pula macamnya, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.¹⁷

Wawancara yang menjadi pilihan peneliti adalah wawancara terstruktur secara mendalam agar informasi yang diberikan dapat diketahui secara jelas. Disaat pengumpulan data berlangsung, peneliti membawa pedoman wawancara disertai alat-alat pendukung pengumpul data, seperti perekam suara, kamera video dan alat-alat tulis.

2. Kajian dokumen tertulis dan literatur pendukung

Hasil wawancara bisa dapat didukung secara kredibel melalui catatan dokumen atas peristiwa yang telah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk melalui catatan hasil perjanjian kerjasama (PKB), perjanjian dokumen kerja dan perjanjian negosiasi lainnya. Dukungan lain juga di dapat melalui literatur-literatur seperti artikel, laporan resmi dari Dinas Pertanian dan Holtikultura, serta

¹⁷ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Bapermas), jurnal maupun buku yang bisa diakses melalui internet ataupun didapat secara langsung.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis dan interpretasi data akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut akan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 246-252). Dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Reduksi data

Tahapan ini merangkum hasil wawancara yang telah didapatkan dari subjek penelitian, kemudian pemilihan hasil wawancara difokuskan pada hal-hal yang pokok, dan dicari tema beserta polanya. Proses tersebut dilakukan supaya mempermudah peneliti untuk menemukan data yang dicari.

2. Penyajian data

Penyajian akan menggunakan teks naratif. Serta dimungkinkan pula disertakan grafik, matrik jejaring kerja dan tabel. Dalam hal tersebut penyajian data berkaitan dengan upaya perundingan bipartit yang telah dilakukan.

3. Verifikasi

Tahapan ini merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses. Sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, walaupun

nantinya dimungkinkan akan terjadi perubahan dan perkembangan jika bukti-bukti dan konsekuensi dari perundingan bipartit tidak didukung dengan data yang kuat.

Secara garis besar dari tiga tahapan diatas, analisis terhadap bentuk data kualitatif merupakan upaya pada pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan untuk dikelola, disintesis, kemudian mencari dan menemukan polanya, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan kemudian diputuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain).¹⁸

1.7.8 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proporsisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta